

Judul : Pulihkan Ekonomi, Banggar DPR Dorong Efektivitas Penanganan Covid-19
Tanggal : Jumat, 04 Juni 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Pulihkan Ekonomi, Banggar DPR Dorong Efektivitas Penanganan Covid-19

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah berharap belanja pemerintah pusat mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial. Karena itu, beberapa prioritas belanja yang dilakukan pemerintah harus tepat sasaran. Salah satunya dengan memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional 2022.

Menurut Said, prioritas belanja pemerintah juga harus mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali

sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha dan membantu sektor UMKM untuk segera bangkit. "Semua alokasi anggaran pemerintah pusat tersebut harus berbasis kepada *output*, *outcome* dan hasil yang terukur dengan baik (*result based*)," kata Said di Jakarta kemarin.

Selain itu, rencana pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini dikatakannya penting agar jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi daerah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi selama ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Kami mendukung upaya pe-

merintah untuk menjadikan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan *quality control* anggaran; memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi; serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional," tutur politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

TKDD tidak hanya menutupi kekurangan APBD, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif di daerah. Karena itu, politikus asal Sumenep, Madura, ini mendorong agar kebijakan dana desa yang sudah memasuki tahun ke delapan, lebih difokuskan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Di samping itu, mengembangkan peran desa sebagai lumbung ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budi daya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa. "Ini urgen agar memperkuat keberadaan desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pembangunan ekonomi nasional," katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini melanjutkan, APBN 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada 2023. Hal mana defisit anggaran akan kembali berada di bawah 3%, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 2/2020. #3M#mencucitangan#menjagajarak#memakaimasker#ingatpesanibu.

□ **adamprawira**